

ABSTRACT

ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN PREVENTING RADICALISM IN COMMUNITY ORGANIZATIONS

(Study at the Office of National Unity and Political Unity Agency, Way Kanan Regency)

By

FIRGINIYA FIRDAUS

Radicalism is an understanding or flow that requires social and political change, by using acts of violence as a stepping stone to justify their beliefs that are considered true. The issue of radicalism has become a discourse that has been interesting in the public domain lately due to the massive radical movement in Indonesia which is marked by the emergence of several sects, sects and new groups in the name of Islam. This phenomenon then becomes the reason for the need for more roles from the Regional Government in preventing radicalism in community organizations. One of the concerns is the prevention of radicalism movements in the Way Kanan Regency region. This condition is related to the proliferation of issues and practices of radicalism in society, some of the main issues that are related include: (1) Low sense of solidarity and social ties in society; (2) The majority of the Way Kanan Regency community is Lampung and Muslim, although religious and community life in the Way Kanan district is quite harmonious, but there is still a certain level of fanaticism that can break the unity and unity of the nation in the community; and (3) The low understanding of the noble values of national culture so that frequent occurrences of friction / conflict between ethnic groups and religions in the community. The results of this study indicate that the Way Kanan District and Political Unity Agency has carried out its role as a policy. The role as a policy in question is in the form of a strategy to increase the transfer of good and right knowledge, and to complete understanding believed to be able to disentangle public awareness. However, practically the implementation of the role as a policy is still very limited in quantity and

intensity. Strengthening and expansion of policies still need to be accompanied by adequate funding.

Keywords: Role, Local Government, Radicalism.

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH RADIKALISME PADA ORGANISASI MASYARAKAT

(Studi pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan)

Oleh

FIRGINIYA FIRDAUS

Fenomena radikalisme seringkali disandarkan dengan paham keagamaan yang sebetulnya berdiri sendiri, faktor sosial, ekonomi, lingkungan, politik bahkan pendidikanpun ikut andil dalam memengaruhi radikalisme agama, termasuk salah satunya persoalan penangkapan terduga jaringan paham radikalisme di Lampung. Permasalahan tersebut diteliti dengan proses pengumpulan data secara dokumentatif dan wawancara dengan pihak kesbangpol. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut; (1) Peran sebagai Suatu Kebijakan, berupa transfer pengetahuan yang baik dan benar; (2) Peran sebagai Strategi terdiri berupa strategi Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan meminimalisir kesenjangan sosial serta penguatan peran masyarakat; (3) Peran sebagai Alat Komunikasi berupa menyaring informasi yang tepat, ikut aktif mensosialisasikan bahaya dan dampak dari radikalisme dan terorisme. Untuk selanjutnya disarankan upaya peningkatan pelaksanaan peran badan Kesbangpol Kabupaten Way Kanan, berupa; (1) Peningkatan Peran sebagai Alat Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan khususnya dalam menyaring informasi yang tepat dan ikut aktif mensosialisasikan bahaya dan dampak dari radikalisme dan terorisme; dan (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan perlu meningkatkan peran dalam menjaga silaturahmi diantara kelompok-kelompok masyarakat sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan; dan (3) Selain itu upaya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak kegiatan bersama antara kelompok-kelompok soial keagamaan di masyarakat, sehingga tercipta kerukunan dan kebersamaan menuju perdamaian.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Radikalisme.